



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHADI PURWANTARA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **139768**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **4.220.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah Seluas 931 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/172 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 681 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1239 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HADIAH Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **161.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **39.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **297.006.732**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.717.006.732
III. HUTANG	Rp.	183.531.405
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.533.475.327

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.